BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2022 DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tata cara penetapan dan pembagian besaran serta petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2022 dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran dan Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2022 dalam Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2022 DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai

suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
9. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Sekretaris Gampong adalah pembantu keuchik/kepala gampong dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau akan ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati.
11. Tuha peut gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
12. Rencana Kerja Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama Keuchik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
16. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
18. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
19. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong.
20. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sejumlah uang yang dibayarkan pada Keuchik dan Perangkat Gampong atas jabatan yang diembannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersumber dari ADG.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya ADG adalah untuk membiayai :
   a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
   b. pelaksanaan pembangunan gampong;
   c. pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
   d. pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Tujuan diberikannya ADG adalah :

a. mewujudkan pemerintahan gampong yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
b. meningkatkan nilai-nilai keagamaan, adat dan sosial budaya dalam rangka penguatan pemerintahan gampong;
c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
d. memajukan perekonomian masyarakat gampong serta pemberdayaan masyarakat gampong;
e. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat gampong guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
f. mengefektifkan perencanaan pembangunan gampong dengan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat gampong untuk pengembangan potensi dan aset gampong guna kesejahteraan bersama;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat gampong guna mewujudkan masyarakat gampong yang mampu memelihara kesatuan sosial;
h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan gampong; dan
i. meningkatkan pendapatan gampong dan ekonomi masyarakat gampong melalui BUMG.

BAB III
SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

Pendanaan ADG bersumber dari APBK.

BAB IV
PENENTUAN BESARAN

Pasal 4

(1) ADG merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten.

(2) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(3) Besaran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp. 62.679.082.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana Alokasi Umum Formula sebesar Rp. 61.377.795.900,00; dan
b. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.1.301.286.100,00

(4) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap keuchik dan perangkat gampong.

(5) Besaran ADG untuk masing-masing gampong dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ADG.

(2) Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim Fasilitasi.

Pasal 6

(1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
   a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi ADG;
   b. melakukan koordinasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
   c. melakukan kegiatan koordinasi pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADG; dan
   d. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 7

(1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
   a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran ADG;
   b. melakukan fasilitasi pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan ADG;
   c. melakukan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan gampong;
   d. melakukan fasilitasi pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
   e. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 8

(1) Keuchik dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/ Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

BAB VI
PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 9

(1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADG sebagai berikut:
   a. telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Fasilitasi dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
      1. Qanun APBG Tahun 2022 telah ditetapkan, serta telah dilakukan evaluasi oleh Bupati dan / atau didelegasikan kepada Camat;
      2. semua pekerjaan/kegiatan tahun dan atau tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
      4. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.
   b. melengkapi/mencukupi dokumen sebagai berikut :
      1. permohonan penyaluran dari Keuchik/Pj. Keuchik kepada Bupati;
      2. fotokopi Qanun RPJMG atau Qanun RPJMG Perubahan (untuk pengajuan tahap I);
      3. fotokopi Qanun RKPG Tahun 2022 (untuk pengajuan tahap I);
      4. fotokopi Qanun APBG Tahun 2022 (untuk pengajuan tahap I) dan fotokopi Qanun Perubahan APBG Tahun 2022 (untuk tahap II/akhir bila ada perubahan APBG);
      5. fotokopi Surat Keputusan (SK) Penunjukan Bank sebagai Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan mengetahui Camat);
      6. fotokopi print rekening koran kas gampong (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan dan mengetahui Camat);
      7. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Keuchik (dilegalisir Camat);

8. fotokopi Surat Keputusan (SK) Bendahara Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj.Keuchik dan mengetahui Camat);
9. fotokopi KTP Keuchik/Pj. Keuchik (dilegalisir Camat);
10. fotokopi KTP Bendahara Gampong (dilegalisir Camat);
11. fotokopi NPWP Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan mengetahui Camat);
12. pakta integritas bermeterai cukup; dan
13. kwitansi penerimaan bermeterai cukup.

(2) Pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat dilakukan dengan persetujuan Camat.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

(1) ADG dianggarkan setiap tahun dalam APBK.

(2) Bupati menetapkan besaran sementara ADG untuk masing-masing gampong setiap awal tahun anggaran.

(3) Pemerintah Gampong membuka rekening kas gampong pada Bank diwilayahnya atau yang terdekat.

(4) Keuchik mengajukan permohonan penyaluran ADG kepada Bupati melalui Camat.

(5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi.

(6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten meneruskan berkas permohonan penyaluran berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten menyalurkan ADG dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(8) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank 100%, dengan 3 (tiga) tahap yaitu :
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADG setiap Gampong paling cepat bulan Pebruari 2022, dan disalurkan setiap bulannya sesuai dengan Gampong yang layak salur;
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADG setiap Gampong paling cepat bulan Mei 2022, dan disalurkan setiap bulannya sesuai dengan Gampong yang layak salur; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADG setiap Gampong paling cepat bulan Oktober 2022, dan disalurkan setiap bulannya sesuai dengan Gampong yang layak salur.

(9) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat digabungkan bila bulan sebelumnya tidak terealisasi.

(10) Dalam hal terjadi selisih perhitungan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(11) Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan penyaluran ADG untuk Gampong pada akhir tahun anggaran berjalan maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 11

(1) ADG diprioritaskan untuk biaya belanja:
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, antara lain :
      1. penghasilan tetap Keuchik Non PNS, Perangkat Gampong Non PNS, dan Perangkat Gampong Khusus secara proporsional;
      2. tunjangan Keuchik PNS dan Pj. Keuchik;
      3. tunjangan Sekretaris Gampong PNS;
      4. operasional Pemerintah Gampong;
      5. tunjangan dan uang sidang Tuha Peut Gampong, secara proporsional;
      6. operasional Tuha Peut Gampong;
      7. insentif dusun atau nama lain.
   b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong.

(2) Prioritas ADG sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(3) Penggunaan ADG mengacu pada RPJMG dan RKPG Tahun 2022.

BAB IX
PENGELOLAAN

Pasal 12

(1) Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) ADG merupakan bagian dari sumber pendapatan gampong.

(3) Besaran ADG dituangkan dalam Qanun Gampong tentang APBG Tahun 2022.

(4) Keuchik atau Penjabat Keuchik sebagai pemegang kekuasaan keuangan gampong bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan ADG.

Pasal 13

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong, kecuali apabila mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pengeluaran kas gampong dimaksud bilamana Qanun Gampong tentang APBG belum mendapat pengesahan.

(4) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kegiatan yang dibiayai dengan ADG harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan ADG menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Gampong.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Keuchik dengan difasilitasi oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

(2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADG adalah sebagai berikut :

a. laporan berkala, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat pada waktu pengajuan permohonan penyaluran tahap berikutnya; dan

b. laporan akhir tahun penggunaan ADG memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi, dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADG.

(4) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran dan/atau tahap sebelumnya.

(5) Bupati dapat mengurangi penyaluran dana gampong dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(6) SiLPA ADG yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa sisa ADG yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADG yang diterima Gampong.

(7) Penggunaan ADG yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(8) Pengurangan ADG dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBG.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari ADG dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 17 Desember 2021 M
13 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 17 Desember 2021 M
13 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 45

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2022 DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE WILAYAH	NAMA GAMPONG	KECAMATAN	PAGU ALOKASI DANA GAMPONG
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	11.01.01.2001	KEUDE BAKONGAN	BAKONGAN	251.171.948
2	11.01.01.2002	UJONG MANGKI	BAKONGAN	251.171.948
3	11.01.01.2003	UJONG PADANG	BAKONGAN	251.171.948
4	11.01.01.2004	GAMPONG DRIEN	BAKONGAN	251.171.948
5	11.01.01.2015	DARUL IKHSAN	BAKONGAN	251.171.948
6	11.01.01.2016	PADANG BEURAHAN	BAKONGAN	251.171.948
7	11.01.01.2017	GAMPONG BARO	BAKONGAN	251.171.948
8	11.01.02.2001	FAJAR HARAPAN	KLUET UTARA	251.171.948
9	11.01.02.2002	KRUENG BATEE	KLUET UTARA	275.438.348
10	11.01.02.2003	PASI KUALA ASAHAN	KLUET UTARA	251.171.948
11	11.01.02.2004	GUNONG PULO	KLUET UTARA	251.171.948
12	11.01.02.2005	PULO IE I	KLUET UTARA	251.171.948
13	11.01.02.2006	JAMBO MANYANG	KLUET UTARA	251.171.948
14	11.01.02.2007	SIMPANG EMPAT	KLUET UTARA	251.171.948
15	11.01.02.2008	LIMAUPURUT	KLUET UTARA	200.212.508
16	11.01.02.2009	PULO KAMBING	KLUET UTARA	251.171.948
17	11.01.02.2010	KAMPUNG PAYA	KLUET UTARA	224.478.908
18	11.01.02.2011	KRUENG BATU	KLUET UTARA	275.438.348
19	11.01.02.2012	KRUENG KLUET	KLUET UTARA	224.478.908
20	11.01.02.2013	ALURMAS	KLUET UTARA	251.171.948
21	11.01.02.2016	SIMPANG LHEE	KLUET UTARA	224.478.908
22	11.01.02.2017	SUAQ GERINGGENG	KLUET UTARA	224.478.908
23	11.01.02.2018	PASI KUALA BA'U	KLUET UTARA	224.478.908
24	11.01.02.2019	KEDAI PADANG	KLUET UTARA	251.171.948
25	11.01.02.2020	KOTAFAJAR	KLUET UTARA	323.971.148
26	11.01.02.2021	GUNUNG PUDUNG	KLUET UTARA	251.171.948
27	11.01.02.2022	KAMPUNG TINGGI	KLUET UTARA	224.478.908
28	11.01.02.2023	RUAK	KLUET UTARA	251.171.948
29	11.01.03.2018	SUAQ BAKUNG	KLUET SELATAN	248.745.308
30	11.01.03.2002	RANTAU BINUANG	KLUET SELATAN	224.478.908
31	11.01.03.2003	BARAT DAYA	KLUET SELATAN	224.478.908
32	11.01.03.2004	SIALANG	KLUET SELATAN	251.171.948
33	11.01.03.2005	KAPEH	KLUET SELATAN	224.478.908
34	11.01.03.2006	PULO IE	KLUET SELATAN	224.478.908
35	11.01.03.2007	KEDAI RUNDING	KLUET SELATAN	299.704.748
36	11.01.03.2008	KEDAI KANDANG	KLUET SELATAN	251.171.948
37	11.01.03.2009	GAMPONG LUAR	KLUET SELATAN	224.478.908
38	11.01.03.2010	UJUNG	KLUET SELATAN	224.478.908
39	11.01.03.2011	JUA	KLUET SELATAN	224.478.908

NO	KODE WILAYAH	NAMA GAMPONG	KECAMATAN	PAGU ALOKASI DANA GAMPONG
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
40	11.01.03.2012	PASI MEURAPAT	KLUET SELATAN	251.171.948
41	11.01.03.2013	UJUNG PASIR	KLUET SELATAN	224.478.908
42	11.01.03.2014	GEULUMBUK	KLUET SELATAN	224.478.908
43	11.01.03.2015	PASIE LEMBANG	KLUET SELATAN	224.478.908
44	11.01.03.2016	UJUNG PADANG	KLUET SELATAN	224.478.908
45	11.01.03.2017	INDRA DAMAI	KLUET SELATAN	273.011.708
46	11.01.04.2001	BAKAU HULU	LABUHANHAJI	248.745.308
47	11.01.04.2002	PADANG BAKAU	LABUHANHAJI	273.011.708
48	11.01.04.2003	MANGGIS HARAPAN	LABUHANHAJI	224.478.908
49	11.01.04.2004	PASAR LAMA	LABUHANHAJI	248.745.308
50	11.01.04.2005	APHA	LABUHANHAJI	251.171.948
51	11.01.04.2006	UJUNG BATU	LABUHANHAJI	224.478.908
52	11.01.04.2007	PAWOH	LABUHANHAJI	299.704.748
53	11.01.04.2008	DALAM	LABUHANHAJI	226.905.548
54	11.01.04.2009	KOTA PALAK	LABUHANHAJI	224.478.908
55	11.01.04.2010	CACANG	LABUHANHAJI	275.438.348
56	11.01.04.2011	TENGAH PISANG	LABUHANHAJI	224.478.908
57	11.01.04.2012	PISANG	LABUHANHAJI	248.745.308
58	11.01.04.2013	HULU PISANG	LABUHANHAJI	224.478.908
59	11.01.04.2014	TENGAH BARU	LABUHANHAJI	275.438.348
60	11.01.04.2015	LEMBAH BARU	LABUHANHAJI	200.212.508
61	11.01.04.2016	PADANG BARU	LABUHANHAJI	200.212.508
62	11.01.05.2024	KUTA BULOH II	MEUKEK	251.171.948
63	11.01.05.2002	KUTA BULOH I	MEUKEK	248.745.308
64	11.01.05.2003	IE DINGEN	MEUKEK	299.704.748
65	11.01.05.2004	DRIEN JALO	MEUKEK	226.905.548
66	11.01.05.2005	JAMBO PAPEUN	MEUKEK	297.278.108
67	11.01.05.2006	BUKIT MEUH	MEUKEK	200.212.508
68	11.01.05.2007	BLANG KUALA	MEUKEK	275.438.348
69	11.01.05.2008	ROT TEUNGOH	MEUKEK	275.438.348
70	11.01.05.2009	ALUE BARO	MEUKEK	224.478.908
71	11.01.05.2010	LADANG TUHA	MEUKEK	200.212.508
72	11.01.05.2011	LHOK MAMPLAM	MEUKEK	251.171.948
73	11.01.05.2012	ARUN TUNGGAI	MEUKEK	248.745.308
74	11.01.05.2013	BLANG TEUNGOH	MEUKEK	226.905.548
75	11.01.05.2014	BLANG BLADEH	MEUKEK	251.171.948
76	11.01.05.2015	IE BUBOH	MEUKEK	200.212.508
77	11.01.05.2016	KEUDE MEUKEK	MEUKEK	224.478.908
78	11.01.05.2017	KUTA BARO	MEUKEK	200.212.508
79	11.01.05.2018	TANJUNG HARAPAN	MEUKEK	200.212.508
80	11.01.05.2019	LABUHAN TAROK	MEUKEK	251.171.948
81	11.01.05.2020	LHOK AMAN	MEUKEK	251.171.948
82	11.01.05.2021	ALUE MEUTUAH	MEUKEK	224.478.908
83	11.01.05.2022	LADANG BARO	MEUKEK	200.212.508
84	11.01.05.2023	LABUHAN TAROK II	MEUKEK	251.171.948
85	11.01.06.2001	DALAM	SAMADUA	251.171.948
86	11.01.06.2002	SUBARANG	SAMADUA	224.478.908
87	11.01.06.2003	KOTA BARU	SAMADUA	224.478.908
88	11.01.06.2004	GUNUNG KETEK	SAMADUA	224.478.908
89	11.01.06.2005	LADANG PANTON LUAS	SAMADUA	251.171.948
90	11.01.06.2006	MADAT	SAMADUA	251.171.948

NO	KODE WILAYAH	NAMA GAMPONG	KECAMATAN	PAGU ALOKASI DANA GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
91	11.01.06.2007	ALUR SUMERAH	SAMADUA	224.478.908
92	11.01.06.2008	TENGAH	SAMADUA	251.171.948
93	11.01.06.2009	GUNUNG CUT	SAMADUA	251.171.948
94	11.01.06.2010	ALUR PINANG	SAMADUA	251.171.948
95	11.01.06.2011	KUTA BLANG	SAMADUA	248.745.308
96	11.01.06.2012	BATEE TUNGGAI	SAMADUA	224.478.908
97	11.01.06.2013	UJUNG TANAH	SAMADUA	251.171.948
98	11.01.06.2014	UJUNG KAMPUNG	SAMADUA	251.171.948
99	11.01.06.2015	JILATANG	SAMADUA	224.478.908
100	11.01.06.2016	LUAR	SAMADUA	224.478.908
101	11.01.06.2017	LUBUK LAYU	SAMADUA	251.171.948
102	11.01.06.2018	SUAQ HULU	SAMADUA	224.478.908
103	11.01.06.2019	TAMPANG	SAMADUA	251.171.948
104	11.01.06.2020	PAYONAN GADANG	SAMADUA	251.171.948
105	11.01.06.2021	GADANG	SAMADUA	251.171.948
106	11.01.06.2022	BARU	SAMADUA	224.478.908
107	11.01.06.2023	LADANG KASIK PUTIH	SAMADUA	224.478.908
108	11.01.06.2024	AIR SIALANG HILIR	SAMADUA	251.171.948
109	11.01.06.2025	AIR SIALANG HULU	SAMADUA	251.171.948
110	11.01.06.2026	AIR SIALANG TENGAH	SAMADUA	224.478.908
111	11.01.06.2027	BALAI	SAMADUA	200.212.508
112	11.01.06.2028	ARAFAH	SAMADUA	251.171.948
113	11.01.07.2001	SIKULAT	SAWANG	251.171.948
114	11.01.07.2002	SAWANG I	SAWANG	224.478.908
115	11.01.07.2003	MEULIGO	SAWANG	224.478.908
116	11.01.07.2004	LHOK PAWOH	SAWANG	275.438.348
117	11.01.07.2005	SAWANG II	SAWANG	224.478.908
118	11.01.07.2006	UJUNG KARANG	SAWANG	251.171.948
119	11.01.07.2007	TRIENG MEUDURO BAROH	SAWANG	251.171.948
120	11.01.07.2008	TRIENG MEUDURO TUNONG	SAWANG	251.171.948
121	11.01.07.2009	PANTON LUAS	SAWANG	224.478.908
122	11.01.07.2010	SIMPANG TIGA	SAWANG	224.478.908
123	11.01.07.2011	KUTA BARO	SAWANG	251.171.948
124	11.01.07.2012	BLANG GELINGGANG	SAWANG	224.478.908
125	11.01.07.2013	MUTIARA	SAWANG	224.478.908
126	11.01.07.2014	UJUNG PADANG	SAWANG	224.478.908
127	11.01.07.2015	SAWANG BA'U	SAWANG	224.478.908
128	11.01.08.2017	LHOK KEUTAPANG	TAPAKTUAN	251.171.948
129	11.01.08.2018	HILIR	TAPAKTUAN	273.011.708
130	11.01.08.2019	PADANG	TAPAKTUAN	224.478.908
131	11.01.08.2020	HULU	TAPAKTUAN	251.171.948
132	11.01.08.2021	JAMBO APHA	TAPAKTUAN	224.478.908
133	11.01.08.2022	TEPI AIR	TAPAKTUAN	226.905.548
134	11.01.08.2023	PASAR	TAPAKTUAN	224.478.908
135	11.01.08.2024	LHOK BENGKUANG	TAPAKTUAN	248.745.308
136	11.01.08.2009	PANTON LUAS	TAPAKTUAN	200.212.508
137	11.01.08.2010	GUNUNG KERAMBIL	TAPAKTUAN	251.171.948
138	11.01.08.2011	AIR BERUDANG	TAPAKTUAN	299.704.748
139	11.01.08.2012	BATU ITAM	TAPAKTUAN	251.171.948
140	11.01.08.2013	PANJUPIAN	TAPAKTUAN	251.171.948
141	11.01.08.2014	LHOK RUKAM	TAPAKTUAN	224.478.908

NO	KODE WILAYAH	NAMA GAMPONG	KECAMATAN	PAGU ALOKASI DANA GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142	11.01.08.2015	AIR PINANG	TAPAKTUAN	224.478.908
143	11.01.08.2016	LHOK BENGKUANG TIMUR	TAPAKTUAN	224.478.908
144	11.01.09.2001	KEUDE TRUMON	TRUMON	248.745.308
145	11.01.09.2002	UJONG TANOH	TRUMON	251.171.948
146	11.01.09.2003	SIGLENG	TRUMON	224.478.908
147	11.01.09.2004	IE MEUDAMA	TRUMON	251.171.948
148	11.01.09.2005	TEUPIN TINGGI	TRUMON	224.478.908
149	11.01.09.2006	KUTA BARO	TRUMON	224.478.908
150	11.01.09.2007	PANTON BILIE	TRUMON	251.171.948
151	11.01.09.2012	KUTA PADANG	TRUMON	224.478.908
152	11.01.09.2013	RAKET	TRUMON	224.478.908
153	11.01.09.2014	GAMPONG TEUNGOH	TRUMON	224.478.908
154	11.01.09.2015	SENEUBOK JAYA	TRUMON	224.478.908
155	11.01.09.2016	PADANG HARAPAN	TRUMON	251.171.948
156	11.01.10.2001	LADANG TEUNGOH	PASIE RAJA	251.171.948
157	11.01.10.2002	PUCOK KRUENG	PASIE RAJA	224.478.908
158	11.01.10.2003	SILOLO	PASIE RAJA	275.438.348
159	11.01.10.2004	KAMPUNG BARU	PASIE RAJA	251.171.948
160	11.01.10.2005	PANTON BILI	PASIE RAJA	251.171.948
161	11.01.10.2006	PAYA ATEUK	PASIE RAJA	248.745.308
162	11.01.10.2007	LADANG TUHA	PASIE RAJA	251.171.948
163	11.01.10.2008	MATA IE	PASIE RAJA	251.171.948
164	11.01.10.2009	UJONG BATEE	PASIE RAJA	251.171.948
165	11.01.10.2010	LHOK SIALANG CUT	PASIE RAJA	224.478.908
166	11.01.10.2011	SEUNEUBOK	PASIE RAJA	226.905.548
167	11.01.10.2012	IE MIRAH	PASIE RAJA	251.171.948
168	11.01.10.2013	PASIE RASIAN	PASIE RAJA	251.171.948
169	11.01.10.2014	UJUNG PADANG RASIAN	PASIE RAJA	224.478.908
170	11.01.10.2015	KRUENG KALEE	PASIE RAJA	251.171.948
171	11.01.10.2016	LHOK SIALANG RAYEUK	PASIE RAJA	251.171.948
172	11.01.10.2017	GAMPONG BARO	PASIE RAJA	251.171.948
173	11.01.10.2018	TEUPIN GAJAH	PASIE RAJA	251.171.948
174	11.01.10.2019	UJUNG PADANG ASAHAN	PASIE RAJA	251.171.948
175	11.01.10.2020	PULO IE II	PASIE RAJA	224.478.908
176	11.01.10.2021	PANTE RAJA	PASIE RAJA	251.171.948
177	11.01.11.2001	TENGAH PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	275.438.348
178	11.01.11.2002	PAYA PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	248.745.308
179	11.01.11.2003	PADANG PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	224.478.908
180	11.01.11.2004	AUR PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	224.478.908
181	11.01.11.2005	LIMAU SARING	LABUHANHAJI TIMUR	248.745.308
182	11.01.11.2006	BEUTONG	LABUHANHAJI TIMUR	248.745.308
183	11.01.11.2007	PEUNEULOP	LABUHANHAJI TIMUR	224.478.908
184	11.01.11.2008	GUNUNG ROTAN	LABUHANHAJI TIMUR	275.438.348
185	11.01.11.2009	KEUMUMU HILIR	LABUHANHAJI TIMUR	224.478.908
186	11.01.11.2010	KEUMUMU HULU	LABUHANHAJI TIMUR	224.478.908
187	11.01.11.2011	KEUMUMU SEBERANG	LABUHANHAJI TIMUR	251.171.948
188	11.01.11.2012	SAWANG INDAH	LABUHANHAJI TIMUR	224.478.908
189	11.01.12.2001	TUTONG	LABUHANHAJI BARAT	275.438.348
190	11.01.12.2002	TENGAH IBOH	LABUHANHAJI BARAT	224.478.908
191	11.01.12.2003	PEULOKAN	LABUHANHAJI BARAT	224.478.908
192	11.01.12.2004	KUTA IBOH	LABUHANHAJI BARAT	248.745.308

NO	KODE WILAYAH	NAMA GAMPONG	KECAMATAN	PAGU ALOKASI DANA GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
193	11.01.12.2005	UJUNG PADANG	LABUHANHAJI BARAT	248.745.308
194	11.01.12.2006	BLANG BARU	LABUHANHAJI BARAT	248.745.308
195	11.01.12.2007	BLANG POROH	LABUHANHAJI BARAT	275.438.348
196	11.01.12.2008	PULO IE	LABUHANHAJI BARAT	200.212.508
197	11.01.12.2009	SUAK LOKAN	LABUHANHAJI BARAT	275.438.348
198	11.01.12.2010	IKU LHUENG	LABUHANHAJI BARAT	224.478.908
199	11.01.12.2011	KUTA TRIENG	LABUHANHAJI BARAT	275.438.348
200	11.01.12.2012	PANTE GEULIMA	LABUHANHAJI BARAT	251.171.948
201	11.01.12.2013	PANTON PAWOH	LABUHANHAJI BARAT	251.171.948
202	11.01.12.2014	BATEE MEUCANANG	LABUHANHAJI BARAT	248.745.308
203	11.01.12.2015	PANTON RUBEEK	LABUHANHAJI BARAT	224.478.908
204	11.01.13.2001	KOTO	KLUET TENGAH	251.171.948
205	11.01.13.2002	ALUR KEUJRUN	KLUET TENGAH	251.171.948
206	11.01.13.2003	JAMBOR PAPAN	KLUET TENGAH	251.171.948
207	11.01.13.2004	MALAKA	KLUET TENGAH	224.478.908
208	11.01.13.2005	KOTO INDARUNG	KLUET TENGAH	251.171.948
209	11.01.13.2006	SIURAI-URAI	KLUET TENGAH	251.171.948
210	11.01.13.2007	KAMPUNG SAWAH	KLUET TENGAH	251.171.948
211	11.01.13.2008	KAMPUNG PADANG	KLUET TENGAH	251.171.948
212	11.01.13.2009	PULO AIR	KLUET TENGAH	224.478.908
213	11.01.13.2010	LAWE MELANG	KLUET TENGAH	251.171.948
214	11.01.13.2011	MERSAK	KLUET TENGAH	224.478.908
215	11.01.13.2014	SIMPANG DUA	KLUET TENGAH	224.478.908
216	11.01.13.2015	SIMPANG TIGA	KLUET TENGAH	251.171.948
217	11.01.14.2001	PAYA DAPUR	KLUET TIMUR	248.745.308
218	11.01.14.2002	SAPIK	KLUET TIMUR	251.171.948
219	11.01.14.2003	ALAI	KLUET TIMUR	224.478.908
220	11.01.14.2004	DURIAN KAWAN	KLUET TIMUR	273.011.708
221	11.01.14.2005	LAWE SAWAH	KLUET TIMUR	251.171.948
222	11.01.14.2006	LAWE BULUH DIDI	KLUET TIMUR	224.478.908
223	11.01.14.2007	PUCUK LEMBANG	KLUET TIMUR	248.745.308
224	11.01.14.2008	PAYA LABA	KLUET TIMUR	248.745.308
225	11.01.14.2009	LAWE CIMANOK	KLUET TIMUR	224.478.908
226	11.01.15.2001	SEUBADEH	BAKONGAN TIMUR	251.171.948
227	11.01.15.2002	LADANG RIMBA	BAKONGAN TIMUR	251.171.948
228	11.01.15.2003	UJONG PULO RAYEUK	BAKONGAN TIMUR	224.478.908
229	11.01.15.2004	SAWAH TINGKEUM	BAKONGAN TIMUR	251.171.948
230	11.01.15.2005	SIMPANG	BAKONGAN TIMUR	224.478.908
231	11.01.15.2006	UJONG PULO CUT	BAKONGAN TIMUR	200.212.508
232	11.01.15.2008	SEULEUKAT	BAKONGAN TIMUR	275.438.348
233	11.01.16.2005	PINTO RIMBA	TRUMON TIMUR	224.478.908
234	11.01.16.2006	KRUENG LUAS	TRUMON TIMUR	224.478.908
235	11.01.16.2007	JAMBO DALEM	TRUMON TIMUR	251.171.948
236	11.01.16.2008	KAPA SEUSAK	TRUMON TIMUR	224.478.908
237	11.01.16.2009	SEUNEUBOK PUNTO	TRUMON TIMUR	251.171.948
238	11.01.16.2010	SEUNEUBOK PUSAKA	TRUMON TIMUR	224.478.908
239	11.01.16.2011	ALUE BUJOK	TRUMON TIMUR	251.171.948
240	11.01.16.2012	TITI POBEN	TRUMON TIMUR	251.171.948
241	11.01.17.2001	BUKET GADENG	KOTA BAHAGIA	251.171.948
242	11.01.17.2002	RAMBONG	KOTA BAHAGIA	251.171.948
243	11.01.17.2003	SEUNEUBOK KEURANJI	KOTA BAHAGIA	224.478.908

NO	KODE WILAYAH	NAMA GAMPONG	KECAMATAN	PAGU ALOKASI DANA GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
244	11.01.17.2004	SEUNEUBOK ALUR BULOH	KOTA BAHAGIA	224.478.908
245	11.01.17.2005	UJONG TANOH	KOTA BAHAGIA	251.171.948
246	11.01.17.2006	UJONG GUNONG CUT	KOTA BAHAGIA	224.478.908
247	11.01.17.2007	UJONG GUNONG RAYEUK	KOTA BAHAGIA	224.478.908
248	11.01.17.2008	BEUTONG	KOTA BAHAGIA	224.478.908
249	11.01.17.2009	JAMBO KEUPOK	KOTA BAHAGIA	251.171.948
250	11.01.17.2010	ALUR_DUAMAS	KOTA BAHAGIA	224.478.908
251	11.01.18.2001	LADANG RIMBA	TRUMON TENGAH	224.478.908
252	11.01.18.2002	GUNONG KAPHO	TRUMON TENGAH	226.905.548
253	11.01.18.2003	KAMPONG TEUNGOH	TRUMON TENGAH	200.212.508
254	11.01.18.2004	KRUENG BATEE	TRUMON TENGAH	224.478.908
255	11.01.18.2005	PULO PAYA	TRUMON TENGAH	251.171.948
256	11.01.18.2006	JAMBO PAPEUN	TRUMON TENGAH	251.171.948
257	11.01.18.2007	COT BAYU	TRUMON TENGAH	251.171.948
258	11.01.18.2008	NACA	TRUMON TENGAH	251.171.948
259	11.01.18.2009	IE JEUREUNEH	TRUMON TENGAH	251.171.948
260	11.01.18.2010	LHOK RAYA	TRUMON TENGAH	251.171.948
Total				62.679.082.000

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN